

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

2020

PERBUP KAB SUKOHARJO NO 52 TAHUN 2020,BD.52, KABUPATEN SUKOHARJO; 66 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NO 52 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

ABSTRAK:

- bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang cenderung masih meningkat dan meluas dari waktu ke waktu yang membawa dampak dibidang politik ekonomi sosialbudaya dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan rencana dan upaya yang komperhensif dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- bahwa dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menuju kearah penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo, perlu diambil kebijakan untuk pengaturanya;
- bahwa dalam rangka pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 untuk menuju kearah penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pedoman dalam pelaksanaanya;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah penanganan Corona Virus Disease 2019 dan penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019.
- Dasar hukum peraturan bupati sukoharjo ini adalah : UU No 13 Tahun 1950;UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 j.o UU No 15 Tahun 2019; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 j.o UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 40 Tahun 1991; PP No 21 Tahun 2008; PP No 72 Tahun 2017;PP No 17 Tahun 2018; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 17 Tahun 2018; Keppres No 11 Tahun 2020; Keppres No 11 Tahun 2020; Inpres No 6 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015 j.o Permendagri No 120 Tahun 2018; Permenkes No 45 Tahun 2014; Permenkes No 82 Tahun 2014; Permenkes No 75 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2020;Perda Kab Sukoharjo No 1 Tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No 12 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Buypati Ini Diatur Tentang :
  1. Ketentuan Umum

2. Maksud Dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Pentahapan
5. Pelaksanaan
6. Pencegahan Dan/Atau Penanganan *Covid-19*
7. Peran Serta Masyarakat
8. Pendanaan
9. Sanksi
10. Ketentuan Lain-Lain
11. Ketentuan Peralihan
12. Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 19 Agustus 2020.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2020.